

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu peristiwa moneter penting dan sering dijumpai di hampir semua Negara di dunia adalah inflasi. Inflasi merupakan salah satu gejala ekonomi yang sering dihadapi oleh sebuah Negara, baik Negara maju maupun Negara sedang berkembang. Setiap kali terjadi gejolak sosial, politik maupun ekonomi baik dari dalam negeri maupun luar negeri akan berdampak pada keadaan ekonomi yang dikaitkan dengan masalah inflasi, hal ini merupakan objek kajian yang sangat menarik. Inflasi di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, sedang giat-giatnya membangun dan juga meraup investasi modal asing yang bersumber pada import bahan industri yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Seiring dengan semakin menyatunya perekonomian nasional ke dalam tatanan ekonomi dunia, maka iklim ketidakpastian yang menjadi ciri dalam dinamika perekonomian global pun harus dihadapi oleh perekonomian Indonesia. Iklim ketidakpastian tersebut, terutama yang berkaitan dengan perubahan pada nilai tukar sebagian akan tercermin sebagai ketidakpastian perubahan harga-harga barang dalam masyarakat. Dalam jangka panjang, ketidakpastian harga akan menyulitkan pelaku ekonomi domestik maupun internasional untuk melakukan perencanaan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusinya, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi domestik, laju inflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait yaitu ekspektasi masyarakat terhadap laju inflasi, jumlah likuiditas yang beredar dalam perekonomian, tingkat penggunaan kapasitas usaha, dan faktor musiman. Dalam kaitannya dengan nilai tukar, tekanan domestik pada inflasi dapat pula disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dan distribusi domestik sebagai akibat dari depresiasi dan gejolak pada nilai tukar. Lebih dari itu, inefisiensi dan ketidakseimbangan pada struktur fundamental mikro-ekonomi, khususnya disektor-sektor yang erat kaitannya dengan produksi dan distribusi, dapat memperdalam dan memperpanjang tekanan pada laju inflasi terutama jika terjadi gejolak berkelanjutan pada faktor eksternal (khususnya nilai tukar).

Semua hal diatas mencerminkan kompleksitas dalam pengendalian dan stabilisasi laju inflasi melalui moneter yang menjadi tugas pokok Bank Indonesia. Inflasi ternyata bukan semata-mata disebabkan oleh jumlah uang beredar sebagaimana yang ditekankan oleh *Hobelaurate* Profesor Milton Friedman. Sehingga, secara teknis dalam hubungannya dengan kebijakan moneter, Bank Indonesia dituntut untuk mengidentifikasi suatu indeks harga yang relevan dengan kebijakan moneter, yaitu indeks harga yang dapat dikendalikan melalui pengelolaan jumlah uang yang beredar. Indeks harga tersebut selanjutnya menjadi suatu patokan (*anchor*) dalam implementasi kebijakan moneter. (Buletin Ekonomi dan Moneter dan Perbankan, Juli 1998 hal 60)

Krisis moneter telah menempatkan inflasi sebagai salah satu indikator strategis bagi upaya mengeluarkan perekonomian nasional dari resesi yang berkepanjangan. Sampai saat ini berbagai upaya telah dilakukan pemerintah baik itu melalui pengendalian inflasi dari sisi moneter oleh Bank Indonesia sebagai Otoritas Moneter, maupun kebijakan disinflasi dari sisi penawaran agregat oleh departemen-departemen yang terkait langsung dengan sisi produksi dan distribusi barang-barang konsumen. (Buletin BI, 2002hal 12)

Dalam kaitannya dengan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, salah satu faktor terpenting bagi efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya oleh Bank Indonesia adalah pemahaman mengenai terbentuknya ekspektasi inflasi oleh para pelaku ekonomi. Dengan diperolehnya pemahaman tersebut maka dapat dilakukan taksiran ekspektasi inflasi yang selanjutnya sebagai: (1) arahan bagi penentuan target inflasi moneter oleh Bank Indonesia, dan (2) masukan bagi kebijakan disinflasi non-moneter oleh pemerintah c.q departemen terkait.(Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, September 1998 hal 94)

Dalam keadaan inflasi, hanya barang-barang naik relatif cepat dan cukup tinggi. Demikian juga dengan biaya modal (*cost of capital*) dari suatu proyek investasi akan semakin mahal yang juga diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga. Daya beli masyarakat semakin melemah sehingga terjadi kelesuan disegala sektor riil yang diikuti dengan menambahnya jumlah pengangguran. Suku bunga merupakan instrumen konvensional untuk mengendalikan atau menekan laju pertumbuhan inflasi.

Suku bunga yang tinggi akan mendorong orang untuk menanamkan modalnya dibank daripada menginvestasikannya pada sektor produksi atau industri, yang risikonya jauh lebih besar dibandingkan dengan menanamkan uang dibank terutama dalam bentuk deposito. Suku bunga yang tinggi menyedot jumlah uang yang beredar dimasyarakat. Namun disisi lain tingginya suku bunga akan meningkatkan nilai uang selain menyebabkan besarnya opportunity cost pada sektor industri atau sektor riil. Jumlah uang yang beredar pada masa inflasi juga akan mempengaruhi PDB (*Produk Domestik Bruto*). Jumlah PDB akan turun jika terjadi inflasi dan akan meningkat apabila inflasi berhasil ditekan pertumbuhannya.

Perkembangan inflasi selama 2003 menunjukkan perkembangan yang menurun. Dilihat dari indikator IHK, perkembangan inflasi 2003 tercatat sebesar 5,06%, menurun tajam dibandingkan 2002 (10,03%). Penurunan ini terutama bersumber dari penurunan harga dikelompok bahan makanan dan lebih rendahnya peningkatan harga hampir di seluruh kelompok barang. Berbagai indikator inflasi lainnya juga menunjukkan perkembangan yang menurun meskipun tidak setajam penurunan IHK. Secara fundamental, penyebab menurunnya tekanan inflasi adalah menguatnya nilai tukar rupiah dan menurunnya ekspektasi inflasi. Sementara perkembangan interaksi permintaan dan penawaran agregat yang menunjukkan perkembangan moderat tidak memberikan tekanan yang berarti. Faktor lainnya yang lebih bersifat nonfundamental yang juga menyebabkan penurunan inflasi adalah adanya kejutan penawaran yang positif (*favourable supply shock*) di kelompok bahan

makanan dan menurunnya tekanan inflasi yang bersumber dari kebijakan pemerintah dibidang harga.

Perkembangan berbagai faktor yang memberikan tekanan penurunan inflasi tersebut pada akhirnya mengakibatkan perkembangan inflasi IHK 2003 berada dibawah sasaran Bank Indonesia ( $9\% \pm 1\%$ ). Hal tersebut disebabkan oleh lebih rendahnya realisasi berbagai variabel, baik yang tergolong dalam faktor fundamental maupun nonfundamental dari yang telah diasumsikan di awal tahun. Dari kedua faktor tersebut, penyebab utama menurunnya inflasi IHK lebih disebabkan oleh faktor nonfundamental. Hal ini menegaskan bahwa struktur inflasi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi sisi penawaran sehingga sangat rentan terhadap adanya kejutan pasokan (*supply shock*). Perkembangan inflasi IHK 2003 memperlihatkan bahwa struktur inflasi Indonesia yang didalam mekanisme pembentukan harganya lebih banyak dipengaruhi sisi penawaran masih rentan terhadap adanya kejutan pasokan barang (*supply shock*). Disamping itu, struktur inflasi Indonesia juga menunjukkan adanya rigiditas dalam proses pembentukan harga di tingkat produsen sehingga kebijakan moneter membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam mempengaruhi perkembangan harga-harga.

Dari seluruh jenjang jalur distribusi, mulai dari produsen, pedagang besar, maupun pedagang eceran, lebih dominannya pengaruh sisi penawaran dalam mekanisme pembentukan harga terutama disebabkan oleh besarnya peran komponen biaya input (*direct cost*). Kondisi ini mengakibatkan perkembangan harga dapat berkejolak bila terjadi perubahan biaya input

akibat gangguan di sisi penawaran, seperti adanya gangguan pasokan dan adanya perubahan *administered price*. Dampaknya terhadap gejolak inflasi yang dihitung berdasarkan IHK menjadi semakin besar, mengingat perkembangan harga barang-barang yang sangat dipengaruhi oleh kejutan pasokan dan kebijakan pemerintah di bidang harga memiliki kontribusi yang cukup besar, yaitu sekitar 40%. (Laporan Tahunan Bank Indonesia, 2003 hal 57)

Langkah untuk memerangi inflasi merupakan salah satu fokus dari kebijakan ekonomi. Kebijakan yang berkaitan dengan inflasi biasanya dikenal sebagai kebijakan stabilitas harga atau kebijakan untuk mencapai keseimbangan intern. Memang langkah terbaik pengendalian harga adalah didasarkan pada kekuatan tarik-menarik antara permintaan dan penawaran barang dan jasa. Namun demikian, proses diatas tidak selamanya mulus, sebab banyak sekali variabel ekonomi dan non ekonomi yang dapat mempengaruhi harga. (Insukindro, 1997 hal 52)

Untuk tahun 2003, Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi sebesar 9,0% dan deviasi  $\pm 1,0\%$ . Sasaran ini diharapkan tercapai jika ekspektasi inflasi terus menurun, nilai tukar rupiah rata-rata Rp 9.000 per USD, pertumbuhan ekonomi 3,8%, dan sumbangan dari dampak kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga tidak lebih 3,02%.

Pertumbuhan uang primer yang konsisten dengan sasaran inflasi tersebut diperkirakan akan berada pada kisaran 13%-14%. Dalam hal ini,

penurunan suku bunga akan dilakukan secara berhati-hati dengan memperhatikan perkembangan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi.

Nilai tukar diperkirakan akan stabil pada kisaran Rp 8.800- Rp 9.200 per USD. Perkiraan tersebut didasarkan pada membaiknya kinerja perekonomian Indonesia termasuk neraca pembayaran yang masih mengalami surplus, keberhasilan restrukturisasi utang pemerintah dan swasta, serta keberhasilan program privatisasi BUMN dan divestasi asset BPPN.

Tujuan Bank Indonesia menurut UUBI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia menetapkan target inflasi sebagai sasaran akhir. Diawal tahun 2002, Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi IHK tahun 2002 sebesar 9-10%. Angka ini didasarkan atas berbagai asumsi seperti ekspektasi masyarakat terhadap inflasi dampak kebijakan harga dari pemerintah, serta perkiraan lengkap mengenai kondisi ekonomi.

Dalam kenyataannya, dampak kenaikan harga komoditi yang dikendalikan pemerintah lebih tinggi dari yang diperkirakan. Namun demikian, upaya Bank Indonesia untuk memelihara kestabilan moneter selama 2002 telah turut menekan tingkat inflasi IHK menjadi 10,03% (y-o-y), atau hanya sedikit diatas sasaran awal sebesar 9-10%. Dalam rangka mengendalikan inflasi, Bank Indonesia berupaya mengendalikan jumlah uang primer melalui penyerapan kelebihan likuiditas perbankan dengan tetap memperhatikan perkembangan suku bunga, agar dapat memberikan sinyal positif kepada sektor riil. Disamping itu, Bank Indonesia terus menjaga agar

nilai tukar rupiah tidak bergejolak terlalu besar, hal mana dapat mengganggu stabilitas ekonomi. (Jurnal, Indonesia 2002 dan Prospeknya 2003)

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik mengambil judul:  
*"Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Tahun 1983-2003"*.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh kurs terhadap inflasi di Indonesia tahun 1983-2003?
2. Seberapa besar pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia tahun 1983-2003?

#### **C. Batasan Masalah**

Agar pembahasan permasalahan dapat terarah, maka penulis memberikan batasan terhadap objek penelitian dimana pembahasan masalah hanya ditentukan pada "pengaruh nilai tukar (kurs), dan jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia tahun 1983-2003".

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh nilai tukar (kurs) terhadap inflasi di Indonesia tahun 1983-2003.

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia tahun 1983-2003.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan adalah:

1. Untuk memberikan informasi bagi peneliti lain yang tertarik masalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah atau lembaga terkait dalam mengambil dan menentukan sebuah keputusan.
3. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan keilmuan mengenai Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Tahun 1983-2003.